
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 9, Nomor 2 (April 2025)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v9i2.1472

Submitted: 12 Juli 2024	Accepted: 12 September 2024	Published: 29 Desember 2024
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Agama Dan Etika Politik: Peran Gereja dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi

Yan Malino*, Agus Supratikno; Irene Ludji

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

762023002@student.uksw.edu*

Abstract

The argument of this research is that the church has a moral and ethical responsibility to conduct political education through discourse on political ethics in public spaces. This is based on historical facts that the Cristianity since the independence movement until now has had potential power and significant influence in politics in Indonesia. This research used the hermeneutic phenomenology method in the context of socio-political history. The result of the research showed that the church is quite proactive in responding to national and state issues in the Reformation Era, but it is still not optimal to conduct discourse on political ethics in public spaces. The political role of the church in general is still limited to carrying out liturgical ritual activities, praying together, and issuing formal shepherding calls at every election event.

Keywords: *democracy; general election; populism; public space; socio-politics*

Abstrak

Argumentasi penelitian ini adalah gereja memiliki tanggung jawab moral dan etis melakukan pendidikan politik melalui diskursus etika politik di ruang-ruang publik. Hal ini didasarkan atas fakta sejarah bahwa agama sejak masa pergerakan perjuangan kemerdekaan sampai dengan masa kini memiliki kekuatan potensial dan pengaruh signifikan dalam perpolitikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi hermeneutik dalam konteks sejarah sosio-politik. Hasil peneliteiten menunjukkan bahwa gereja cukup pro aktif menyikapi persoalan bangsa dan negara di Era Reformasi, namun masih kurang maksimal memanfaatkan ruang publik untuk melakukan diskursus etika politik. Peran politik gereja secara umum masih sebatas melakukan kegiatan ritual liturgis, doa bersama, dan mengeluarkan seruan formal pengembangan pada setiap perhelatan pemilu.

Kata Kunci: demokrasi; pemilu; populisme; ruang publik; sosio-politik

PENDAHULUAN

Gerakan Reformasi 1998, yang melengserkan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, menjadi penanda peran signifikan masyarakat sipil dalam proses demokratisasi Indonesia.¹ Perbaikan sistem demokrasi hasil perjuangan gerakan reformasi seharusnya telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan rakyat yang berkeadilan sosial. Namun, sampai usia 26 tahun (1998-2024), enam kali pemilu belum sepenuhnya memenuhi harapan cita-cita gerakan reformasi tentang tata pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan sosial dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghilangkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Demokratisasi hasil reformasi hanya menguntungkan pihak elite politik. Penegakan hukum, korupsi, pelanggaran HAM, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup, dan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan serius di Indonesia.² Diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih menjadi persoalan serius dari negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Setiap kali terjadi perhelatan pergantian pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional, selalu menyertakan agama dalam pertarungan perebutan kekuasaan. Menurut Agus Supratikno, keberadaan sila pertama Pancasila menunjukkan keberadaan politis agama dalam demokrasi Indonesia sebagai sebuah keniscayaan.³ Agama sebagai fondasi kehidupan spiritual umat, ibarat magnet yang menarik minat politisi dalam proses pertarungan perebutan kekuasaan. Populisme pemimpin agama memiliki daya tarik khusus dalam lanskap politik di Indonesia. Pilihan politik pemimpin agama menjadi preferensi utama pilihan politik umat.⁴ Tokoh agama memiliki pengaruh dan peran dalam dinamika politik dari sejak periode pergerakan perjuangan kemerdekaan sampai di Era Reformasi.

Memperhatikan problematika kehidupan sosial-politik Era Reformasi dan mempertimbangkan peran strategis agama dalam setiap perhelatan politik kekuasaan di Indonesia, maka pemuka agama memiliki kedudukan strategis fungsional dan signifikan bagi pendidikan politik dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan

¹ Abdul Rahman, "Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 139–50.

² Nur Rohim Yunus, Rezki Annissa, and Taryono Taryono, "The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998," *Journal of Legal Research* 3, no. 3 (2021): 493–510, <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20929>.

³ Agus Supratikno, *Agama Dan Politik* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023), 26–31.

⁴ Juhana Nasrudin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): 34–47, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.

Kepala Daerah (Pilkada) berkualitas. Namun, signifikansi agama dalam percaturan politik membuka celah politisasi dan kapitalisasi agama oleh para elite yang tidak mencerminkan esensi pembebasan dari agama.

Gereja sebagai penjaga benteng moral dan etika memiliki panggilan melakukan diskursus etika politik. Gereja bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan pencerdasan politik agar warga jemaat mengerti dinamika politik di daerah atau nasional dan memahami preferensi politik setiap partai politik, rezim berkuasa, serta rekam jejak para calon. Diskusi di ruang-ruang publik menjadi sarana mempertajam cakrawala berpikir dan memperluas horizon pengetahuan umat tentang kontestasi dan konstelasi politik di Indonesia.

Ada beberapa penelitian yang pernah mengaji tentang gereja dan politik, yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini. Zakaria J. Ngelow mengemukakan tesis bahwa politik Kristen bukanlah politik kekuasaan atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi politik untuk melayani dan mem-

perjuangkan kepentingan umum demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan.⁵ Peneliteian Alter I Wowor mengemukakan bahwa gereja memainkan peran sebagai fungsi kontrol dan politik identitas.⁶ Berikutnya juga ada peneliteian yang mengemukakan tesis bahwa agama dan negara adalah dua lembaga yang dibentuk Allah dan dipakai untuk menyatakan kehendak-Nya.⁷ Selanjutnya, kajian lainnya menemukan bahwa nilai ke-Tuhan-an yang menghidupi nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik temu Pancasila dan etika politik gereja.⁸ Terakhir, peneliteian lainnya mengemukakan argumentasi pentingnya gereja memberikan edukasi kepada warga untuk memiliki kesadaran politik.⁹

Sementara itu, fokus kajian ini lebih spesifik pada peran gereja untuk melakukan pendidikan politik dalam diskursus etika politik di ruang publik Indonesia di Era Reformasi 1998-2024. Peneliteian ini memakai gagasan tentang diskursus, ruang publik, dan etika politik sebagai landasan konseptual. Konsep tentang universalisme, pro-seduralisme, “yang moral” (*das Moralische*), “yang

⁵ Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama-Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–34, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.

⁶ Alter I. Wawor, “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern,” *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–23, <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.

⁷ Henny Debora Sianipar and Pratiwi Eunike, “Prespektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara,” *Journal of Religious and Socio*

Cultural 1, no. 1 (2020): 33–46, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v1i1.38>.

⁸ David Eko Setiawan and Firman Panjaitan, “Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia,” *Jurnal SMArT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 7, no. 1 (2021): 43–55, <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1234>.

⁹ Marfan Ferdinan Tahamata and Agus Supratikno, “Peran Politik Gereja Dalam Tahun Politik 2024: Studi Kasus GKI Serpong,” *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 13, no. 2 (2024): 227–48, <https://doi.org/10.51828/td.v13i2.386>.

etis” (*das Ethische*), dan ruang publik dalam gagasan etika diskursus Jurgen Habermas sangat penting mendapatkan perhatian dalam diskursus etika politik dunia kontemporer pluralistik.

F. Budi Hardiman dengan terang menguraikan konsep-konsep tersebut dalam makalah seri kuliah filsafat mengangkat topik “Etika Politik Habermas” di komunitas Salihara.¹⁰ Budi Hardiman menjelaskan bahwa “yang moral” dan “yang etis” atau “yang adil” dan “yang baik” menjadi penanda seluruh pemikiran Habermas di dalam Etika Diskursus. Yang etis bersifat partikuler dan bersifat memihak karena terkait dengan orientasi nilai atau hidup baik oleh komunitas atau agama tertentu berdasarkan caranya sendiri dalam menafsirkan. Sedangkan “yang moral” bersifat universal karena tidak memihak, formal, dan netral terhadap persoalan-persoalan evaluatif tentang hidup yang baik. Adil itu terkait moral karena dikejar semua bangsa, agama, ras, partai, ...; sedangkan hidup yang baik atau nilai-nilai kultural terkait dengan komunitas tertentu.

Budi Hardiman menuliskan bahwa menurut Habermas, “hak-hak komunikatif warga negara terlaksana terutama di dalam diskursus-diskursus informal yang dapat dilaksanakan secara inklusif dan dapat mem-

persoalkan tema yang relevan.” Aspirasi politis masyarakat dapat terbangun secara komunikatif melalui diskursus. “Ruang publik adalah *locus* bagi proses pencarian itu,” demikian dicatatkan Budi Hardiman. Lebih lanjut Hardiman menjelaskan bahwa, “Habermas memahami ruang publik politis sebagai kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang dibutuhkan masyarakat dalam perlawanan terhadap sumber-sumber lain, yakni uang (pasar kapitalis) dan kuasa (birokrasi negara), agar tercapai suatu keseimbangan.”

Diskursus etika politik menggabungkan dua konsep, yaitu etika sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman atau mengatur perilaku manusia, dan konsep politik sebagai aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi atau negara.¹¹ Diskursus etika politik mencakup berbagai segi kehidupan sosial-politik yang melibatkan pemahaman tentang perilaku dan tindakan politik yang didasarkan atas prinsip-prinsip moral dan etika. Diskursus etika politik di negara demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin dan para pembuat kebijakan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akun-

¹⁰ F. Budi Hardiman, “Etika Politik Habermas,” in *Seri Kuliah Filsafat* (Komunitas Salihara, 2010).

¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2018).

tabilitas. Semua prinsip itu merupakan elemen penting untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem politik.

Etika politik merupakan filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia.¹² Menurut Haryatmoko, etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu tujuan politik, masalah pilihan sarana (*polity*) yang meliputi tatanan dan kekuatan-kekuatan politik, dan berhadapan dengan aksi politik (*politics*) yang meliputi rasionalitas tindakan dan keutamaan.¹³ Itu berarti etika politik bukan semata menilai kelakuan para politisi, tetapi mewacanakan narasi prinsip-prinsip moral yang mendasari penyelenggaraan penataan kehidupan bersama. Etika politik mencakup etika individu maupun etika sosial.

Fungsi, tugas dan manfaat etika politik dijelaskan oleh Franz Magnis-Suseno dalam bukunya yang berjudul “Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.”¹⁴ Menurut Magnis, fungsi etika politik adalah menyiapkan alat-alat teoritis dalam mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, sedangkan tugas etika politik membedah masalah-masalah ideologis penataan kehidupan masyarakat. Kemudian manfaatnya adalah menuntut para penguasa untuk mempertanggungjawabkan klaim penataan kehi-

dupan bangsa berdasarkan prinsip-prinsip moral dasar. Etika politik menunjukkan dan menggambarkan patokan dan pegangan normatif bagi masyarakat dalam menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik berdasarkan martabat manusia. Searah dengan konsep Romo Magnis, terkandung maksud dari tulisan ini tentang eksplorasi peran gereja melakukan diskursus etika politik.

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi peran gereja melakukan pendidikan politik melalui diskursus etika politik di ruang publik Indonesia Era Reformasi 1998-2024. Dalam menggambarkan peran gereja dalam diskursus etika politik Era Reformasi Indonesia, maka ada empat pertanyaan mendasar yang dijawab. Pertama, bagaimana gereja menyikapi fakta kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikendalikan fundamentalisme pasar yang jauh dari keadilan sosial? Kedua, bagaimana gereja menanggapi konflik komunal yang bernuansa SARA? Ketiga, bagaimana gereja menghadapi fenomena kebangkitan gerakan fundamentalisme agama tertentu dalam persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB)? Keempat, bagaimana peran diskursus etika politik dari gereja dalam proses kontestasi Pemilu dan Pilkada Era Reformasi? Analisis hasil penelitian akan

¹² Magnis-Suseno.

¹³ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003).

¹⁴ Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.

menunjukkan urgensi dan signifikansi artikel dalam spektrum pengetahuan agama dan politik, khususnya etika politik.

METODE PENELITIAN

Penelitan ini menggunakan metode fenomenologi hermeneutik yang bertujuan memahami makna di balik fenomena.¹⁵ Metode fenomenologi hermeneutik adalah pendekatan kualitatif yang berusaha mencari esensi makna dari suatu fenomena dengan menafsirkan teks-teks kehidupan dan pengalaman hidup individu atau kelompok.¹⁶ Metode ini digunakan untuk menafsirkan teks kehidupan sosial-politik Era Reformasi 1998-2024 di Indonesia dan peran gereja melakukan diskursus etika politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupa Wajah Sosial-Politik Era Reformasi 1998-2024

Wajah kehidupan sosial-politik Indonesia Era Reformasi 1998-2024 tidak terlepas dari preferensi politik rezim pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Menurut F. Budi Hardiman, preferensi politik yang lebih dominan mewarnai lanskap politik Era Reformasi Indonesia adalah

pasar (neo-liberalisme) dan agama, yaitu Islam politik.¹⁷ Preferensi nasionalisme Orba secara praktis dan perlahan ditinggalkan dalam euforia semangat gerakan reformasi menuju pembaruan Indonesia. Pasar dan agama dipilih sebagai kekuatan untuk mengatasi persoalan bangsa. Pasar dipakai sebagai terapi atas krisis ekonomi dan agama dipergunakan untuk mendapatkan kekuatan legitimasi moral kekuasaan. Era Reformasi merupakan era kebangkitan fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama.

Kebangkitan fundamentalisme agama ditandai dengan kembalinya wacana atau narasi agama ke ruang publik yang sekian lama ditarik oleh pemerintah Orba pada ranah privat.¹⁸ Kebangkitan fundamentalisme agama berdampak pada pemanfaatan agama oleh aktor politik dengan mengusung identitas agama sebagai alat kampanye. Akibat dari preferensi agama sebagai politik identitas tampak jelas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang bermuatan SARA.

Pilihan preferensi politik elite kekuasaan Era Reformasi dapat dibaca dari “teks politik” masing-masing penguasa dan ekses-ekses yang ditimbulkan. Pilihan pre-

¹⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kuantitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), viii.

¹⁶ Creswell.

¹⁷ F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 24.

¹⁸ Gusti A.B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jorgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), 191-92.

ferensi politik masing-masing penguasa di Era Reformasi kelihatan mampu mengatasi masalah bangsa. Namun realitas masing-masing preferensi melahirkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi Pancasila. Pasar menciptakan skandal solidaritas bangsa dan agama melahirkan skandal plutaritas.¹⁹

Era Reformasi yang diantarkan oleh presiden B.J. Habibie mulai mencari tatanan bentuk pemerintahan untuk Indonesia baru. Masa awal mengalami apa yang disebut *anomie* dalam teori sosiologi Emil Durkheim.²⁰ *Anomie* yang dimaksudkan Durkheim menunjuk pada keadaan di mana norma-norma sosial dalam masyarakat menjadi longgar, tidak jelas; bahkan hilang. Perubahan kehidupan sosial-politik dari politik otoritarian Orba kepada liberalisasi politik menyebabkan individu atau kelompok masyarakat menjadi kurang terintegrasi dalam kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Indonesia mengalami abnormalitas yang mengancam kohesi sosial bangsa di masa awal Era Reformasi. Krisis ekonomi dan ancaman disintegrasi bangsa menjadi persoalan serius di bawah pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur dan

Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Kasus korupsi, konflik partai dan pergolakan bernuansa SARA terjadi di beberapa daerah, seperti Poso, Papua, Aceh, Sampit, dan Singkawang.²¹ Tantangan pluralisme dan persoalan primordialisme merupakan masalah utama dalam visi Indonesia baru di Era Reformasi.

Berdasarkan situasi dan kondisi bangsa seperti itu, maka dapat dimengerti apabila pilihan preferensi politik elite pada periode pertama (1999-2004) adalah agama (Islam Politik) dalam praktik konservatisme politik agama. Pemilu pertama tahun 1999 sebagai hasil reformasi politik mendudukkan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Namun, sejarah mencatat bahwa dalam situasi bangsa masih abnormal. Para elite partai politik melakukan manuver politik dalam perebutan kekuasaan negara. Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan MPR pada tanggal 21 Juli 2001 dengan tuduhan penyelewengan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar AS dan karena membuat kebijakan-kebijakan kontroversial.²²

¹⁹ Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi Di Indonesia*.

²⁰ Michele Dillon, *Introduction To Sociological Theory: Theorists, Concepts, and Their Applicability to the Twenty-First Century*, 2nd ed. (Blackwell Publishing Ltd, 2014), 106.

²¹ Denny J.A., *Manuver Elit, Konflik, Konservatisme Politik* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

²² Verelladevanka Adryamarthanini and Widya Lestari Ningsih, "Mengapa Gus Dur Dilengserkan Oleh MPR?," Kompas.com, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/25/140000279/mengapa-gus-dur-dilengserkan-oleh-mp->

Demi menjaga stabilitas karena adanya beberapa konflik di daerah, Megawati sebagai pengganti Gus Dur merangkul Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga TNI mengonsolidasikan kekuatan untuk kembali dalam kancah politik nasional dengan strategi yang baru. Hal ini bertentangan dengan amanat reformasi yang menghendaki TNI memerankan peran sebagai bela negara, lepas dari politik kekuasaan. Kepemimpinan Megawati berhasil menciptakan instrumen tatanan pemerintahan yang lebih baik, seperti lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Rakyat di bawah pemerintahan Gus Dur dan Megawati menikmati udara kebebasan berekspresi di ruang-ruang publik.

Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masalahnya. Pada Pemilu kedua Era Reformasi Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berhasil meraih tampuk kekuasaan negara menyingkirkan Megawati melalui Pemilu Presiden secara langsung yang pertama di tahun 2004. Masa kepemimpinan SBY selama satu dekade (2004-2014) mengakhiri masa “*anomie*” Indonesia, tetapi menghadapi persoalan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ironisnya, para kader partai

besutan SBY yang tampil mengisi ruang-ruang publik melalui media massa melakukan diskursus etika politik lewat slogan “katakan tidak pada korupsi,” justru mendedikasikan di penjara karena tersandung korupsi.²³

Menurut Hardiman, penyebab kader-kader terbaik partai Demokrat tersandung kasus korupsi bisa dianalisis dari preferensi politik kepemimpinan SBY di mana kapitalisme merupakan kekuatan politik yang dominan berdaulat.²⁴ Hardiman menilai SBY membuka pintu lebar bagi investasi dari luar negeri dan liberalisasi pasar dalam negeri. Masyarakat dikembangkan dalam hasrat *homo economicus* dan melupakan sisi *homo democraticus*. Akibatnya, dominasi pasar menciptakan persoalan solidaritas sosial dan memberi peluang besar bagi para oligarki menjadi super kaya. Persoalan ekonomi tampak teratasi di masa pemerintahan Presiden SBY, tetapi krisis solidaritas kebangsaan muncul menjadi persoalan serius sebagai akibat dari preferensi nasionalisme yang terlupakan.

Hardiman menilai kepemimpinan *laissez-faire* SBY mendorong sikap anarkis dan menciptakan dekadensi moral dalam masyarakat.²⁵ *Laissez-faire* berasal dari bahasa Perancis yang berarti “membiarkan”; dalam konteks ekonomi pasar bebas menunjuk ke-

²³ Mustafa Moses, “Daftar Kader Demokrat Yang Terlibat Korupsi,” Tempo.co, n.d.

²⁴ Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi Di Indonesia*.

²⁵ Hardiman.

bijakan minimal campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi.²⁶ Pasar tidak bisa menjadi sumber moral karena pasar hanya loyal pada uang. Paradigma politik pasar bebas tidak bisa menciptakan solidaritas bangsa karena pasar menciptakan kompetisi. Mekanisme pasar lebih menguntungkan pihak oligarki ultra kaya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Ketika terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam dalam masyarakat, maka anarkisme dan dekadensi moral berpotensi memecah bela masyarakat.

Preferensi pasar di masa kepemimpinan SBY tampak berhasil menangani krisis ekonomi. Namun negara berada dalam ancaman disintegrasi karena berbagai konflik, seperti di Aceh, Papua, dan Maluku.²⁷ Berbagai konflik bernuansa SARA terjadi di beberapa daerah, seperti konflik Ambon-Maluku. Penutupan dan pembakaran tempat ibadah meningkat eskalasinya; setidaknya terdapat 108 gereja ditutup di periode pertama SBY. Politik identitas keagamaan dan primordialisme kedaerahan bertumbuh subur. Kondisi ini dimanfaatkan oleh gerakan Islam garis keras untuk melakukan penetrasi. Gerakan Islam politis, yaitu kelompok Islam garis keras mendapatkan momentum

di era SBY untuk “meng-islam-kan” Indonesia pada aras lokal dengan memanfaatkan Undang-Undang otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999).

Pemilu keempat Era Reformasi pada tahun 2014 mengakhiri kepemimpinan SBY dengan kemenangan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden ke-7 RI berpasangan dengan Jusuf Kalla. Berdasarkan pengamatan selama pemerintahan Jokowi, penulis menilai kepemimpinan Jokowi tampak mengkolaborasikan dua preferensi politik rezim sebelumnya, yaitu agama dan pasar. Hal tersebut dapat dianalisis lewat pilihan dan kebijakan politik Jokowi. Pasar dipakai membangun kehidupan ekonomi, dan elite agama dimanfaatkan untuk memberi legitimasi kekuatan moral atas kepemimpinan. Di sela-sela kolaborasi preferensi ekonomi dan agama dalam menjalankan kekuasaan politik, ada upaya Jokowi membangkitkan kembali semangat nasionalisme dalam kebijakan-kebijakan politik. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam bidang ekonomi ditempuh melalui program nasionalisasi perusahaan. Setiap tahun upacara peringatan kemerdekaan RI menampilkan busana identitas daerah. Re-eksistensi

²⁶ J. Gwartney and R. Lawson, “Economic Freedom, Investment, and Growth,” *The Journal of Economic Perspectives* 18, no. 3 (2004): 175–90.

²⁷ Syamsul Hadi and Andi Widjajanto, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal Dan Dinamika Internasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 44-181.

nasionalisme dalam bingkai NKRI yang dijiwai roh Pancasila kembali digalakkan.

Satu dekade Era Reformasi (2014-2024) merupakan masa pemulihan dari euforia politik identitas yang berlangsung pada dekade sebelumnya. Gerakan deradikalisasi keagamaan semakin digalakkan melalui program moderasi beragama sampai tingkat pencabutan izin organisasi gerakan Islam garis keras. Kementerian agama menginformasikan tentang rencana menerbitkan peraturan presiden yang akan mempermudah pendirian tempat ibadah. Hasil survei LSI pada kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan tren positif tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.²⁸ Yusril Ihza Mahendra di *chanel youtube* Akbar Faizal *Uncensored*, mengakui bahwa dari semua presiden tidak ada yang menandingi pembangunan infrastruktur oleh Jokowi.²⁹ Presiden Joko Widodo layak digelar bapak infrastruktur Indonesia, tapi utang luar negeri semakin menumpuk.

Perjuangan gerakan reformasi membuat negara Indonesia menjadi lebih baik melalui desentralisasi pemerintahan yang

perlahan membuat pembangunan di daerah bergerak maju, kebebasan pers dan berpendapat, pengembalian fungsi ABRI di bidang pertahanan dan Polri untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁰ Namun menurut Priyono, Indonesia masih defisit demokrasi substansial karena konsolidasi demokrasi oligarki.³¹ Kondisi Indonesia yang masih jauh dari demokrasi substansial, bersih dan bermartabat, terkonfirmasi dalam kontestasi dan konstelasi politik Pemilu 2024.

Banyak kalangan dan pakar menilai pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk dalam sejarah pemilu Indonesia. Proses pemilu diwarnai pengkhianatan moral dan pengabaian etika oleh aparatus negara. Pelanggaran moral dan etika dalam proses pemilu 2024 terbukti dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi mencopot jabatan ketua MK dari Anwar Usman yang adalah paman dari Gibran,³² dan keputusan Dewan Kehormatan Panitia Pemilihan (DKPP) yang memutus ketua dan anggota KPU terbukti melanggar etika dalam

²⁸ Lisye Sri Rahayu, "Survei LSI: Kepuasan Jokowi 82%, Capaian Tertinggi Kinerja Presiden," DetikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6702223/survei-lsi-kepuasan-jokowi-82-capaian-tertinggi-kinerja-presiden>.

²⁹ Yusril Ihza Mahendra, "Menimbang Nasib Politik Jokowi Pasca Lengser" (Indonesia: Akbar Faizal *Uncensored*, n.d.).

³⁰ Pribadi Wicaksono, "20 Tahun Reformasi, Amin Rais: 4 Cita-Cita Ini Berhasil Terwujud," Tempo.com, n.d., [https://www.tempo.co/politik/20-tahun-](https://www.tempo.co/politik/20-tahun-reformasi-amien-rais-4-cita-cita-ini-berhasil-terwujud-927530)

[reformasi-amien-rais-4-cita-cita-ini-berhasil-terwujud-927530](https://www.tempo.co/politik/20-tahun-reformasi-amien-rais-4-cita-cita-ini-berhasil-terwujud-927530).

³¹ A.E. Priyono, *Demokrasi Dan Wilayah "Abu-Abu" Dalam Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan Dari Bawah* (Jakarta: Obor, 2012), 28-47.

³² MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," mkr.id, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751>.

proses penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.³³

Pemilu 2024 seolah memperlihatkan kebenaran kebangkitan neo Orba di Era Reformasi. Realita praktik politik mengindikasikan karakter politik Orba masih mencengkeram dan mengendalikan perilaku politik elite. Rangkaian proses pelanggaran etika dalam pemilu 2024 yang mengantarkan Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden RI menggantikan Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka anak Jokowi sebagai wakil presiden menjadi penanda masih buruknya proses demokrasi Indonesia.

Agama dalam Kehidupan Sosial-Politik Indonesia Era Reformasi 1998-2024

Agama bisa menampilkan dua wajah yang saling kontraproduktif dalam kehidupan sosial-politik. Agama dapat menghambat proses perubahan dengan mempertahankan *status quo* atau mempercepat proses perubahan sosial-politik; bisa menyatukan masyarakat tetapi bisa pula memecah belah masyarakat dengan mengabaikan prinsip-prinsip humanis.³⁴ Agama memiliki potensi menciptakan harmoni dalam kehidu-

pan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Namun dapat pula melahirkan konflik yang menyebabkan disharmoni relasi sosial-politik sesama anak bangsa. Kondisi demikian menjadikan agama sangat potensial menjadi alat kepentingan politik.

Sejarah dunia mencatat situasi problematik dinamika hubungan antara agama dengan negara atau kekuasaan, termasuk di Indonesia. Agama yang menjadi “kuda tunggangan” dalam pertarungan politik kekuasaan dapat menciptakan *chaos* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perebutan politik kekuasaan yang memanfaatkan politik identitas agama dengan memainkan isu-isu keagamaan cenderung menimbulkan konflik sosial horizontal.³⁵ Kasus politik identitas bernuansa SARA (suku, agama, dan ras) dalam pertarungan perebutan kekuasaan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 memberi pelajaran berharga tentang isu krusial agama dalam dinamika politik identitas primordial di Indonesia.³⁶

Sila pertama Pancasila menjadi landasan hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah rumusan religius agama tertentu,

³³ MKRI, “DKPP Jelaskan Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPU Terkait Pencalonan Prabowo-Gibran,” mkri.id, 2023, <https://testing.mkri.id/berita/dkpp-jelaskan-putusan-pelanggaran-etik-ketua-kpu-terkait-pencalonan-prabowo-gibran-20202>.

³⁴ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 310.

³⁵ Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–30, 10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2.

³⁶ Idzam Fautanu, M. Buhori, and Heri Gunawan, “Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid,” *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 87–112.

melainkan rumusan politik negara bahwa “negara Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, melainkan negara demokrasi modern yang mengakui keberadaan yang ilahi.”³⁷ Menurut John A. Titaley, pernyataan dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945, “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,” adalah pernyataan religiositas bangsa Indonesia.³⁸ Tuhan Yang Maha Esa, itulah Tuhan bangsa Indonesia. Bukan Tuhan dari satu agama tertentu saja, dan bukan Tuhan yang diimpor dari luar bangsa Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa itulah yang diyakini menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pernyataan alinea ketiga UUD 1945 adalah credo atau pengakuan iman bangsa Indonesia atas kemerdekaan.

Hakikat hubungan negara dan agama dipertegas dan dijabarkan di pembukaan UUD 1945 dan di batang tubuh pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Landasan konstitusional ini mengakui pluralitas kepercayaan atau agama dan menegaskan prinsip negara yang menjunjung

tinggi KBB di Indonesia. Negara memberi kepastian hukum dan melindungi hak setiap warga menjalankan KBB tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan yang sama dan berkeadilan bagi setiap rakyat, apa pun agama atau aliran kepercayaannya. Namun sang waktu menorehkan dalam catatan sejarah reformasi tentang data dan fakta yang membuktikan bahwa negara Indonesia seakan tak berdaya menindak kelompok-kelompok keagamaan intoleran pelanggar HAM yang melakukan kekerasan terhadap penganut agama yang berbeda paham atau keyakinan dengan mereka. Masih terjadi diskriminasi pelayanan pemerintah terhadap kehidupan keagamaan atau kepercayaan umat tertentu.

Desi Purnamasari membeberkan data tentang pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Protestan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 diperbandingkan dengan pembangunan rumah ibadah agama lainnya.³⁹ Dicatat pada tahun 2013 ada 61.796 unit pembangunan rumah ibadah gereja Kristen Protestan. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan menjadi 57.166 unit di tahun 2016. Setara Institut mencatat peningkatan pelang-

³⁷ Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama-Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.”

³⁸ John A. Titaley, *Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama* (Salatiga: SWCU Press, 2013).

³⁹ Desi Purnamasari, “Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah,” *tirto.id*, 2019, <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>.

garan terhadap KBB di Indonesia dari 175 peristiwa dengan 333 tindakan pada tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan di tahun 2023 menjadi 217 peristiwa dengan 329 pelanggaran.⁴⁰ Dirilis bahwa dari 329 tindakan pelanggaran tersebut, 114 tindakan dilakukan oleh aktor negara, yaitu pemerintah daerah (40 tindakan), Kepolisian (24 tindakan), Satpol PP (10 tindakan), TNI (8 tindakan), Forkopimda (6 tindakan), dan institusi pendidikan (4 tindakan). Kemudian 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara, yaitu warga (78 tindakan), individu (19 tindakan), Majelis Ulama Indonesia-MUI (17 tindakan) dan ormas keagamaan (8 tindakan). Setara Institut juga mencatat keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu aktor utama yang telah menurun tindakannya dari tahun sebelumnya menjadi hanya 2 tindakan pelanggaran. Artinya, pelayanan dan jaminan dari negara untuk KBB di Era Reformasi masih jauh dari roh konstitusi negara Indonesia.

Di daerah lahir berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang Syariah di ranah publik.⁴¹ Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1969 produk Orba yang mempersulit izin pembangunan gedung gereja

justro semakin diperkuat di Era Reformasi dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 yang menyertakan peran Forum Kerukunan Umat Beragama. PGI sebagai perwakilan gereja di Indonesia turut serta berproses dalam lahirnya PBM, tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa PBM tidak mengakhiri kesulitan gereja mendirikan tempat ibadah. Realita di lapangan menunjukkan FKUB justru menjadi senjata kelompok intoleran menghalangi pembangunan tempat ibadah. Hal ini menjadi satu indikator masih lemahnya politik gereja dalam melakukan analisis sosial-politik melalui diskursus etika politik di ruang-ruang publik.

Gereja dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi

Sejarah mencatat tentang pelayanan gereja di bidang politik melalui keterlibatan warganya melakukan “politik Kristen” dalam percaturan politik di Indonesia, baik pada masa perjuangan kemerdekaan, Orla, Orba, maupun di Era Reformasi. Partisipasi politik Kristen disalurkan melalui berbagai partai. Pada masa perjuangan ada CEP (*Christelijk Etische Partij*) yang menjadi CSP

⁴⁰ Setara Institut, “Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2023,” Setara Institut, 2023, <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/>.

⁴¹ Arie Sudjito, “Konstruksi Politik Identitas Keagamaan: Catatan Gejala Munculnya Perda Syariah Di Tiga Daerah Di Indonesia Dalam Politik Identitas Di Indonesia,” in *Pesemaian Cinta Kemanusiaan* (Salatiga: Percik, 2009), 129-35.

(*Christelijk Staatkundige Partij*) yang berwawasan pro-kolonial. Pada Era Orla ada Parkindo (1945) dan Partai Katolik yang memperjuangkan ideologi Pancasila, yang kemudian di Era Orba bergabung ke PDI karena sistem penyederhanaan partai.⁴² Di Era Reformasi orang Kristen seolah tidak mau ketinggalan memanfaatkan liberalisasi partai politik yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Menghadapi pemilu 1999 berdiri sejumlah partai Kristen, namun yang memenuhi persyaratan mengikuti kontestasi dan konstelasi hanya ada tiga partai, yaitu Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), dan Partai Katolik Demokrat (PKD). Pada pemilu 2004 hanya Partai Damai Sejahtera (PDS) yang bisa ikut berkompetisi, dan di pemilu 2009 hanya PDS dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), sebagai gabungan beberapa partai Kristen, yang bisa ikut kontestasi.

Sukses atau tidak orang Kristen atau partai politik Kristen dalam percaturan politik nasional dipengaruhi oleh intensitas diskursus etika politik. Artinya, bagaimana memanfaatkan konsep Romo Magnis tentang tugas etika politik dengan membedah masa-

lah-masalah ideologis penataan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menciptakan atau menguatkan ideologi dan memperkuat identitas kolektif. Sejarah membuktikan partisipasi politik Kristen melalui diskursus etika politik dengan dihapuskannya tujuh kata dalam alinea pertama Piagam Jakarta hasil keputusan kompromistis sidang BPUPKI 16 Juli 1945 yang memberikan hak istimewa atas komunitas Islam. Kata "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di-amandemen dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan pasal 6 ayat 1 UUD, "Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli."⁴³

Kesepakatan baru tersebut tercapai dalam sidang PPKI karena adanya keberatan para tokoh-tokoh Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur yang mengancam menolak bergabung dengan RI jika dualisme hukum dalam konsep pembukaan UUD tetap dipertahankan.⁴⁴ Anggota BPUPKI, Latuharhary yang beragama Kristen dan Soekardjo Wirjopranoto pada sidang BPUPKI 11 Juli 1945 sebenarnya telah mengajukan

⁴² Zakaria J. Ngelow, "Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia," in *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, ed. Zakaria J. Ngelow (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 19-37.

⁴³ Thobias A. Messakh, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007), 142-54.

⁴⁴ Ngelow, "Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia."

ketidaksetujuan atas isi Piagam Jakarta.⁴⁵

Pada masa demokrasi liberal di mana sejumlah kekuatan memperjuangkan ideologi Islam dalam Konstituante, Parkindo dan Partai Katolik tetap berjuang mempertahankan ideologi Pancasila.⁴⁶ Fakta sejarah itu menunjukkan peran politik Kristen yang konsisten dijalankan dalam mendukung pluralitas masyarakat Indonesia dan kegigihan memperjuangkan KBB, serta sikap anti diskriminasi terhadap warga negara demi tegaknya demokrasi Pancasila.

Gereja sebagai bagian dari kekuatan *civil society* sudah seharusnya meningkatkan peran sosial-politik dalam mewujudkan demokrasi dan keadilan sosial berasaskan Pancasila. Peran politik Kristen atau gereja secara kelembagaan bukanlah politik kekuasaan, melainkan politik moral untuk membina Indonesia menjadi rumah kediaman bersama (*oikos*, *home*) bagi semua ciptaan Allah.⁴⁷ Orientasi politik Kristen adalah politik *diakonos*, menjadi pelayan bagi semua tanpa diskriminasi. Implementasi gagasan “*creative minority*” sebagai suatu bentuk “*politics of influence*” *diakonos* untuk mewujudkan Indonesia menjadi *oikos* bagi “*bonum communi*” dapat menjadi jalan baru politik Kristen di Era Reformasi.

Fakta dan data membuktikan perjuangan politik Kristen melalui partai politik Kristen kurang memberi efek signifikan di Era Reformasi. Menurut Martin Lukito Sinaga, penyempitan peran politik Kristen dalam parpol Kristen hanya menghasilkan suara minoritas yang terbukti mendorong “*inertia*” (kelembaman) umat Kristen sendiri yang memiliki akar konservatisme dan eksklusif di masa kolonial yang justru menyuburkan isolasi.⁴⁸ Kedua, menurut Sinaga, tabiat minoritas yang cenderung menumpang dalam struktur kekuasaan, bukan hanya melanggengkan *status quo*, namun juga meniadakan daya terobos dalam demokrasi. Bukan berarti gereja melarang warga jemaat untuk berpolitik. Gereja justru harus mendorong yang terdampak dalam dunia politik untuk terlibat secara aktif. Namun, apabila masih ada yang berniat menjalankan politik Kristen melalui parpol Kristen, penting untuk mempertimbangkan agar mengaji ulang dengan belajar dari sejarah.

Kehadiran parpol umat minoritas dalam negara yang mayoritas penganut agama tertentu, justru mempersempit peran politik dan berpotensi melahirkan isolasi serta diskriminasi. Menurut Ngelow, kurang tepat untuk memperjuangkan “kepentingan

⁴⁵ Messakh, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila*.

⁴⁶ Ngelow, “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia.”

⁴⁷ Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama-Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.”

⁴⁸ Martin Lukito Sinaga, “Jalan Baru Politik Kristen,” *Suara Pembaruan*, n.d.

gereja atau kepentingan Kristen” dalam kondisi sebagai penduduk minoritas di Indonesia melalui parpol Kristen.⁴⁹ Bagi Ngelow, sekalipun semua orang Kristen memilih parpol Kristen, tidak akan mampu membe-reskan persoalan halangan mendirikan gedung gereja, konflik antar komunitas, jaminan kebebasan penginjilan dan lain-lain yang dinilai sebagai kepentingan Kristen. Pelayanan politik Kristen bukan untuk memperjuangkan “kepentingan gereja” tetapi memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Hal ini dapat dijalankan secara aktif melalui diskursus etika politik di ruang-ruang publik.

Diskursus dalam konteks sosial politik adalah cara berbicara dan berinteraksi dengan yang lain. Diskursus etika politik tidak hanya mencakup diskusi tentang tema seputaran kehidupan sosial-politik, tetapi mencakup bagaimana konsep-konsep politik disebarkan, dipahami dan diinterpretasikan oleh individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁵⁰ Diskursus dapat membentuk persepsi dan opini publik tentang isu-isu sosial politik dan dapat memperkuat atau merusak argumen narasi dalam konteks sosial-politik.⁵¹ Diskursus merupakan

sarana atau jenis komunikasi untuk merancang realitas sosial dan politik dengan memengaruhi atau mengubah persepsi individu atau masyarakat tentang isu-isu tertentu, menciptakan atau menguatkan ideologi dan memperkuat identitas kolektif. Analisis diskursus menjadi alat penting untuk memahami bagaimana diskursus membentuk atau memengaruhi persepsi publik dan kebijakan pemerintah.⁵² Diskursus di ruang-ruang publik menjadi sarana bagi gereja dalam menjalankan peran politik Kristen sebagai bagian dari implementasi *creative minority*.

Ruang publik sebagai ruang otonom bagi gereja dalam menyuarakan suara kritis profetik menyikapi setiap kebijakan rezim berkuasa yang menyimpang dari konstitusi. Di ruang-ruang publik, gereja dapat dengan bebas berperan sebagai aktor yang berjuang penuh untuk mendapatkan pengakuan sosial-politis akan identitas kolektif. Fungsionalisasi ruang publik oleh gereja di Era Reformasi sangat signifikan dalam keikutsertaan penanganan konflik-konflik komunal, seperti di Ambon Maluku. Salah satu faktor penyebab konflik Era Reformasi adalah kebijakan negara yang salah menge-

⁴⁹ Ngelow, “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia.”

⁵⁰ Paul A. Chilton and Christina Schäffner, *Politics as Text and Talk: Analytic Approaches to Political Discourse* (Routledge, 2017).

⁵¹ Embang; Nurhadi Uluk, “Menganalisis Kritis Diskursus Kontemporer Menggunakan Model Ruth

Wodak:Kajian Kasus Dalam Isus Sosial-Politik Terkini,” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 3, no. 1 (2023): 63–68, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i1.2194>.

⁵² John Hajek and Bob Hodge, *Critical Discourse Analysis in Translation Studies* (Routledge, 2014).

lola keragaman dan hubungan dalam masyarakat.⁵³ Diskursus tentang toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama oleh gereja memegang peran penting dalam proses membangun kesadaran sebagai sesama anak bangsa. Gereja dalam kerja sama dengan agama lainnya melakukan berbagai seminar dan lokakarya tentang agama dan dialog dalam kerangka merajut kembali ikatan kemanusiaan yang terkoyak konflik komunal berlatar isu SARA.

Signifikansi diskursus di ruang publik bagi gereja di Era Reformasi juga tampak dalam membangun pemahaman tentang gereja dan politik. Menyikapi banyaknya pendeta terjun dalam percaturan politik kekuasaan memaksa gereja-gereja merumuskan pandangan dan melakukan pendidikan politik di berbagai aras pelayanan. Diskursus etika politik gereja menyikapi polemik keterlibatan pendeta dalam politik praktis cukup membantu gereja-gereja dalam menentukan sikap dan mengambil kebijakan. Ada yang menolak dengan memberi pilihan memilih jabatan pendeta atau menjadi calon legislatif, ada pula yang lunak memberi ruang untuk fokus secara total pada politik praktis dengan jalan cuti dari pelayanan di jemaat. Suara penolakan pendeta terjun da-

lam politik praktis bukanlah sikap gereja yang menolak keterlibatan dalam aktivitas politik, melainkan bagian dari diskursus moral dan etika pelayanan pendeta.

Gereja berkewajiban mendidik dan membina warga, termasuk pendeta yang terpanggil untuk berkarya dan melayani di bidang politik. Politik tidak tabu bagi gereja karena medan politik merupakan bagian dari wilayah pelayanan gereja. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap politik karena politik menentukan kehidupan dan pelayanan gereja di dunia. Pandangan bahwa politik itu kotor mesti dijernihkan agar menjadi alasan pembenaran kejahatan politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Politik menjadi kotor karena kinerja politisi-politisi busuk yang melakukan “*money politics, mob politics*, politik dagang sapi, dan karena pengaruh materialisme praktis, pragmatisme, oportunisme, dan formalisme.”⁵⁴ Romo Magnis mengingatkan bahwa “pemilu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi mencegah yang terburuk berkuasa.”

Pandangan bahwa politik itu kotor berasal dari realisme Machiavelli yang membebaskan politik dari moral. Menurut Machiavelli, seorang raja dapat merebut dan mempertahankan kekuasaan tanpa meme-

⁵³ Hadi and Widjanto, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal Dan Dinamika Internasional*.

⁵⁴ O. Carm Piet Go, “Hak Asasi Manusia Dalam Etika Politik,” in *Etos Dan Moralitas Politik: Seni Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 23-25.

dulikan prinsip-prinsip aturan normatif.⁵⁵ Demi kekuasaan, maka segala cara dapat dihalalkan; politik di lepaskan dari moral dan etika. Hal ini bertentangan dengan prinsip politik gereja yang membawa kebaikan bagi seluruh ciptaan. Politik hadir untuk menata, membangun, mengembangkan, dan memelihara kehidupan bersama yang lebih manusiawi. Politik bukan ajang *homo homini lupus est* (serigala bagi sesama), tetapi politik adalah seni pelayanan untuk mengupayakan *bonum commune* (kesejahteraan umum).⁵⁶ Pembangunan dan penataan kehidupan bersama yang manusiawi tidak boleh dijalankan lepas dari moral dan etika politik.⁵⁷ Aksi-aksi politik tidak boleh dipisahkan dari etika. Politik selalu berdimensi moral dan etis. Di situlah peran strategis dan signifikan gereja melakukan diskursus etika politik di ruang-ruang publik.

Gereja berkewajiban untuk mengawal praktik politik berdimensi moral dan etis dengan mengkritisi pelanggaran etika politik. Realitas politik sebagai pertarungan kekuatan yang keras, sarat trik dan intrik, tidak boleh menjadi alasan meminggirkan etika politik. Merujuk pada pemahaman tentang fungsi, tugas dan manfaat etika politik dalam konsepsi Romo Magnis, maka dis-

kursus etika politik oleh gereja memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Warga gereja harus tahu dan memahami wajah politik di Indonesia serta mengerti preferensi politik penguasa. Gereja bertanggung jawab melakukan pencerahan politik dengan melaksanakan pendidikan politik. Apabila gereja sebagai institusi atau individu turut aktif melakukan diskursus etika politik di ruang-ruang publik, baik di ruang dunia nyata maupun di ruang dunia maya, maka umat akan mengalami pencerahan politik. Etika politik menjadi dasar filsafat politik yang diharapkan dapat dihidupi para politisi. Diskursus etika politik memainkan peran penting dalam pesta demokrasi, sebab tak bisa dipungkiri kualitas pesta demokrasi di Indonesia menjadi panggung “sandiwara” oligarki yang memainkan dan memperalat suara rakyat.

Jauh hari sebelum pemilu diselenggarakan, gereja seharusnya pro aktif melaksanakan pencerahan politik di ruang-ruang publik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun berdasarkan observasi dan pengalaman sepanjang Era Reformasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa gereja masih kurang maksimal dalam melakukan diskursus etika politik menjelang pemilu. Ti-

⁵⁵ Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), 70.

⁵⁶ Anicetus B Sinaga, “Pengantar Ketua Komisi KWI,” in *Etos Dan Moralitas Politik: Seni*

Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umum (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 5-7.

⁵⁷ Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3S, 2005), viii.

dak sedikit pemimpin gereja yang dimanfaatkan untuk meraup suara dari umat. Secara umum, kebanyakan gereja mengambil posisi sebatas melakukan kegiatan formalitas liturgis dengan melakukan doa bersama, menerbitkan surat penggembalaan. Gereja kelihatan masih kurang maksimal dalam keterlibatan mengawal proses demokrasi berkualitas yang bermartabat, bermoral dan beretika.

Produksi suara kritis profetik gereja di ruang publik terasa kurang bergaung dalam menyoroti dan menyikapi praktik penyelenggaraan negara. Gereja kurang melakukan diskursus etika politik tentang preferensi politik penguasa. Kendati ada pernyataan sikap dari gereja di Indonesia secara nasional menyikapi pelanggaran etika dan moral, suara kritis profetik gereja dirasa kurang nyaring menyikapi hal itu. Gereja secara kelembagaan pada tataran nasional maupun lokal terkesan mengambil sikap menunggu. Kebanyakan kaum cendekiawan kampus-kampus Kristen memilih diam di saat para cendekiawan bersuara dari berbagai kampus.

Sebagai benteng pertahanan moral dan etika kehidupan umat, sepatutnya gereja tampil di garda terdepan menyuarakan kebenaran. Terdepan untuk mengedukasi umat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang urgensi mengetahui dan

memahami rekam jejak para calon, mengetahui sejarah perjalanan politik di Indonesia dan memahami preferensi politik kontestan pemilu. Gereja harus mengupayakan agar rakyat memiliki pra paham komprehensif tentang dinamika percaturan perebutan kekuasaan nasional atau daerah agar rakyat tidak menjadi korban pragmatisme prosedural pemilu. Perilaku pragmatis pemilih turut berkontribusi terhadap kerusakan kualitas demokrasi dan memperburuk wajah politik nasional atau daerah.

KESIMPULAN

Menghadapi setiap perhelatan pemilu, gereja di Era Reformasi dirasa masih kurang maksimal memanfaatkan ruang publik untuk diskursus etika politik guna mengkritisi preferensi politik setiap rezim pemerintah berkuasa. Gereja pada tataran persekutuan nasional maupun pada tataran sinodal (lokal) umumnya hanya melakukan kegiatan liturgis keagamaan di samping seruan moral secara formal melalui mimbar-mimbar gereja dalam warta jemaat. Penelitian ini menyarankan agar gereja pada setiap aras memperkuat analisis sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Agus Spratikno dan Pdt. Irene Ludji yang telah membantu proses penulisan dengan mem-

berikan koreksi dan gagasan-gagasan sesuai bidang keahlian masing-masing untuk memperkaya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanini, Verelladevanka, and Widya Lestari Ningsih. "Mengapa Gus Dur Dilengserkan Oleh MPR?" Kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/25/140000279/mengapa-gus-dur-dilengserkan-oleh-mpr->
- Berger, Peter L. *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3S, 2005.
- Chilton, Paul A., and Christina Schäffner. *Politics as Text and Talk: Analytic Approaches to Political Discourse*. Routledge, 2017.
- Creswell, John W. *Penelitian Kuantitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Dillon, Michele. *Introduction To Sociological Theory: Theorists, Concepts, and Their Applicability to the Twenty-First Century*. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd, 2014.
- Fautanu, Idzam, M. Buhori, and Heri Gunawan. "Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid." *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 87–112.
- Gwartney, J., and R. Lawson. "Economic Freedom, Investment, and Growth." *The Journal of Economic Perspectives* 18, no. 3 (2004): 175–90.
- Hadi, Syamsul, and Andi Widjajanto. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal Dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hajek, John, and Bob Hodge. *Critical Discourse Analysis in Translation Studies*. Routledge, 2014.
- Hardiman, F. Budi. *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- . "Etika Politik Habermas." In *Seri Kuliah Filsafat*. Komunitas Salihara, 2010.
- Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- J.A., Denny. *Manuver Elit, Konflik, Konservatisme Politik*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Lestari, Yeni Sri. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–30. 10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Menimbang Nasib Politik Jokowi Pasca Lengser." Indonesia: Akbar Faizal Uncensored, n.d.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Menoh, Gusti A.B. *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Messakh, Thobias A. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007.
- MKRI. "DKPP Jelaskan Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPU Terkait Pencalonan Prabowo-Gibran." mkri.id, 2023. <https://>

- testing.mkri.id/berita/dkpp-jelaskan-putusan-pelanggaran-etik-ketua-kpu-terkait-pencalonan-prabowo-gibran-20202.
- . “MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.” mkr.id, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751>.
- Moses, Mustafa. “Daftar Kader Demokrat Yang Terlibat Korupsi.” Tempo.co, n.d.
- Nasrudin, Juhana. “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022).” *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.
- Ngelow, Zakaria J. “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia.” In *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, edited by Zakaria J. Ngelow. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- . “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama-Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–34. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- Piet Go, O. Carm. “Hak Asasi Manusia Dalam Etika Politik.” In *Etos Dan Moralitas Politik: Seni Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Priyono, A.E. *Demokrasi Dan Wilayah “Abu-Abu” Dalam Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan Dari Bawah*. Jakarta: Obor, 2012.
- Purnamasari, Desi. “Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah.” tirta.id, 2019. <https://tirta.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>.
- Rahayu, Lisye Sri. “Survei LSI: Kepuasan Jokowi 82%, Capaian Tertinggi Kinerja Presiden.” DetikNews, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6702223/survei-lsi-kepuasan-jokowi-82-capaian-tertinggi-kinerja-presiden>.
- Rahman, Abdul. “Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 139–50.
- Setara Institut. “Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2023.” Setara Institut, 2023. <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/>.
- Setiawan, David Eko, and Firman Panjaitan. “Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia.” *Jurnal SMART Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 7, no. 1 (2021): 43–55. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1234>.
- Sianipar, Henny Debora, and Pratiwi Eunike. “Presfektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara.” *Journal of Religious and Socio Cultural* 1, no. 1 (2020): 33–46. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v1i1.38>.
- Sinaga, Anicetus B. “Pengantar Ketua Komisi KWI.” In *Etos Dan Moralitas Politik: Seni Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Sinaga, Martin Lukito. “Jalan Baru Politik Kristen.” Suara Pembaruan, n.d.
- Sudjito, Arie. “Konstruksi Politik Identitas Keagamaan: Catatan Gejala Munculnya Perda Syariah Di Tiga Daerah Di Indonesia Dalam Politik Identitas Di Indonesia.” In *Pesemaian Cinta Kemanusiaan*. Salatiga: Percik, 2009.

- Supratikno, Agus. *Agama Dan Politik*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023.
- Tahamata, Marfan Ferdinan, and Agus Supratikno. "Peran Politik Gereja Dalam Tahun Politik 2024: Studi Kasus GKI Serpong." *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 13, no. 2 (2024): 227–48. <https://doi.org/10.51828/td.v13i2.386>.
- Titaley, John A. *Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama*. Salatiga: SWCU Press, 2013.
- Uluk, Embang; Nurhadi. "Menganalisis Kritis Diskursus Kontemporer Menggunakan Model Ruth Wodak: Kajian Kasus Dalam Isus Sosial-Politik Terkini." *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 3, no. 1 (2023): 63–68. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i1.2194>.
- Wawor, Alter I. "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–23. <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.
- Wicaksono, Pribadi. "20 Tahun Reformasi, Amin Rais: 4 Cita-Cita Ini Berhasil Terwujud." *Tempo.Com*, n.d. <https://www.tempo.co/politik/20-tahun-reformasi-amien-rais-4-cita-cita-ini-berhasil-terwujud-927530>.
- Yunus, Nur Rohim, Rezki Annissa, and Taryono Taryono. "The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998." *Journal of Legal Research* 3, no. 3 (2021): 493–510. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20929>.